

**KEYNOTE SPEECH DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DALAM RAPAT KOORDINASI DEWAN PENGAWAS BLU TAHUN 2012**

---

Yang terhormat,

- 1) Bapak dan Ibu Ketua Dewan Pengawas Satker BLU
- 2) Bapak dan Ibu Anggota Dewan Pengawas Satker BLU
- 3) Bapak dan Ibu Sekretaris Dewan Pengawas Satker BLU
- 4) Para Hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara Rapat Koordinasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum bertemakan *"Peningkatan Peran Dewan Pengawas dalam Peningkatan Kinerja Badan Layanan Umum"*.

Rapat kali ini mempertemukan seluruh unsur-unsur Dewan Pengawas pada satker BLU dengan maksud memberikan pemahaman mengenai tugas dan kewajiban Dewan Pengawas BLU yang harus dilakukan, sekaligus mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di satker BLU dan mencari solusi bersama-sama.

Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi perekonomian dunia saat ini dirasakan kurang menggembirakan. Krisis utang di negara-negara Eropa dan Amerika telah berimbas pada menurunnya kinerja ekonomi di seluruh belahan dunia. Dalam perspektif makro, Pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan terburuk dari terus berlanjutnya krisis dengan memperkuat sendi-sendi ekonomi dalam negeri untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah terus meningkatkan kinerja satker BLU yang kita miliki. Kami ingatkan kembali bahwa Badan Layanan Umum merupakan instansi

---

di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Oleh karena itu, **terdapat 3 (tiga) pilar utama yang menjamin keberlangsungan satker BLU**, yaitu:

- (1) Peningkatan kinerja layanan (produktivitas) berupa penyediaan barang/jasa kepada masyarakat,
- (2) Optimalisasi PNBPN untuk mengurangi ketergantungan terhadap RM APBN, dan
- (3) Efisiensi belanja berupa alokasi sumber daya pada faktor-faktor yang memberikan nilai tambah.

Dalam bidang kinerja layanan, saat ini terdapat 143 satker BLU, di mana 85% di antaranya adalah penyedia layanan di bidang kesehatan dan pendidikan yang mempunyai peran penting dalam pencapaian raihan *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015. Aktivitas satker-satker BLU ini perlu terus dikelola secara optimal agar mampu mencapai tujuannya. Dalam hal optimalisasi PNBPN, peran strategis BLU dalam perekonomian nasional direpresentasikan sebagai bagian dari APBN. Pada tahun 2011 realisasi PNBPN BLU mencapai Rp 20,1 triliun yang merupakan 28% dari total PNBPN lainnya sebesar Rp 69,4 triliun (PNBPN yang dihasilkan oleh K/L) di luar PNBPN sumber daya alam dan laba BUMN. Jumlah tersebut dihasilkan oleh 132 satker dari 4.440 satker PNBPN atau hanya sekitar 3% dari seluruh satker PNBPN yang ada. Optimalisasi PNBPN ini juga dapat dilihat dari kecenderungan proporsi RM APBN terhadap seluruh belanja pada satker BLU yang terus menunjukkan penurunan. Sementara di bidang efisiensi belanja, pola remunerasi pada satker BLU yang bersifat *single salary* mampu mengurangi inefisiensi alokasi belanja pegawai pada pembayaran honorarium tim.

Hadirin yang kami hormati,

Sejalan dengan reformasi di bidang keuangan negara, paket UU bidang Keuangan Negara mengamanatkan banyak hal baru yang diharapkan dapat menjadi landasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih baik. Salah satunya, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 68, 69 dan penjelasannya, adalah dengan dimungkinkannya pembentukan BLU guna

---

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan pola PK BLU sesuai PP No. 23 tahun 2005 dapat diartikan sebagai **pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja melalui pemberian fleksibilitas dengan menonjolkan efisiensi dan produktivitas, sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat.**

Namun demikian, sebagaimana pendekatan baru lainnya terhadap manajemen keuangan sektor publik, konsep BLU perlu terus disempurnakan untuk menampung dinamika yang berkembang. Menyitir pendapat David Osborne bahwa *"reinventing public institutions is Herculean work"*, maka diperlukan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk terus mematangkan penerapan PK BLU, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu model yang benar-benar tepat bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas penyediaan layanan kepada masyarakat.

Perlu kami sampaikan, model penerapan PK BLU di Indonesia haruslah meliputi mekanisme daur hidup yang komprehensif, dari pembentukan sampai dengan pencabutan BLU. Pada tahun 2012 ini kami telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja satker BLU, yang menghasilkan 3 (tiga) tindak lanjut utama, yaitu:

- (1) Pembinaan yang lebih intensif kepada satker yang menerapkan PPK BLU, namun belum mampu berkinerja baik.
- (2) Pemberian teguran kepada satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban setelah menjadi satker BLU, dan
- (3) Pencabutan status bagi satker BLU yang tidak berpotensi dan berkinerja tidak baik.

Ketiga langkah dimaksud perlu diambil agar penerapan PK BLU mampu menghasilkan satker yang berkinerja baik, bermartabat, dan berkontribusi bagi perekonomian.

Hadirin yang berbahagia,

Di antara fungsi pembinaan terhadap BLU yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga yang membawahinya, terdapat fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLU. Sesuai ketentuan PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, maka Dewan Pengawas berkewajiban, antara lain:

- 
- (1) Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran, serta hal lainnya yang dianggap penting,
  - (2) Melaporkan gejala penurunan kinerja BLU kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan,
  - (3) Memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU, dan
  - (4) Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan kinerja kepada pengelola BLU.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud pada Satker BLU, Dewan Pengawas harus berperan secara aktif untuk mengawasi pengelolaan keuangan pada masing-masing satker BLU.

Sebagai penunjang atas pelaksanaan tugasnya, kami juga berharap agar satker BLU dapat menyediakan dukungan berupa Sekretaris Dewan Pengawas yang profesional dan penyediaan sumber daya lainnya secara memadai.

Untuk membekali para anggota Dewan Pengawas dengan pemahaman sistem dan prosedur PPK BLU, pada rakor kali ini kami akan menyajikan materi untuk memahami RBA dan laporan keuangan BLU. Tujuannya agar Bapak/Ibu sekalian mempunyai sistem deteksi dini mengenai kinerja satker BLU di bawah pengawasan Bapak/Ibu. Pemantauan yang intensif oleh Dewan Pengawas terbukti efektif untuk menjaga BLU dalam rel akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai contoh: pemahaman mengenai jenis belanja yang diperbolehkan akan menghindarkan alokasi dana yang melanggar ketentuan pelaksanaan APBN, pemahaman terhadap RBA dapat mengarahkan satker BLU untuk fokus pada pencapaian tujuan, dan pemahaman terhadap laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai capaian yang berhasil diraihinya.

Sejalan dengan upaya meningkatkan kinerja satker BLU, kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat lebih berperan di dalamnya. Saat ini kami telah menyelesaikan pedoman penilaian kinerja keuangan satker BLU yang menjadi acuan tingkat kesehatan keuangan satker dimaksud. Namun bagaikan satu keping mata uang yang memiliki 2 (dua) sisi yang berbeda, harus kami akui penilaian kinerja teknis/layanan belum kami lakukan. Untuk itu, kami berharap Bapak/Ibu sekalian mampu menjadi katalisator bagi penyelesaian

---

pedoman penilaian kinerja yang komprehensif, dengan mendorong Kementerian Negara/Lembaga yang terkait untuk melakukan penilaian kinerja teknis/layanan.

Hadirin yang kami hormati,

Semangat *enterprising the government* sudah seharusnya menjadi ruh bagi keseluruhan upaya profesional bagi setiap satker BLU dalam menjalankan layanan kepada masyarakat. **Satker BLU dituntut untuk mampu berkompetisi secara sehat dengan penyedia layanan sejenis, dan tidak melupakan misi/fungsi sosial sebagai sebuah institusi pemerintah yang berkewajiban memberikan layanan.** Fungsi sosial inilah yang menjadi pembeda utama antara sebuah Satker BLU dengan unit usaha swasta dalam memberikan layanan pada masyarakat.

Pemenuhan misi sosial atau tidak mengutamakan mencari keuntungan dalam memberikan layanan mengakibatkan keuntungan yang diperoleh diharapkan dapat dikembalikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan. Tuntutan untuk bertindak profesional, efisien, transparan dan akuntabel menjadi bagian yang harus diwujudkan oleh setiap jajaran pimpinan Satker Badan Layanan Umum.

Kemampuan dalam berkompetisi secara sehat dengan penyedia layanan sejenis menjadikan masyarakat memiliki alternatif dalam memenuhi kebutuhan akan layanan yang diperlukannya. Kemampuan untuk berkompetisi ini hanya dapat terlaksana apabila satker BLU dapat bertindak dengan efisien, yaitu mengalokasikan sumber dayanya dengan bijaksana pada faktor-faktor yang memberikan nilai tambah. Efisiensi yang dilakukan tidak boleh mengorbankan standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat, namun justru memacu untuk menciptakan peluang dan berbagai inovasi manajemen. Diharapkan satker BLU dapat melakukan perubahan paradigma dalam administrasi dan manajemen publik yang lebih berorientasi pada pelanggan (*customer sovereignty*) serta transparans dalam pengelolaan keuangan.

Hadirin yang kami hormati,

Sebagai penutup, kami berharap penerapan PK BLU mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Layanan publik yang realistis, terjangkau, dan berkualitas prima menjadi dambaan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada.

---

Akhirnya, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahiim*, secara resmi, saya buka acara Rapat Koordinasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Tahun 2012. Semoga aktivitas yang kita laksanakan ini membawa manfaat dan kebaikan bagi negara dan bangsa.

*Amin.*

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Agus Suprijanto